

ANALISIS KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN DI IINDONESIA

Sri Wilda

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
wildasri283@gmail.com

Wayan Siskasari

SMK negeri 1 Gianyar
Wayansiskasari123456@gmail.com

Zainal Efendi Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
zainal80.yes@gmail.com

Article History:

Received: Agustus, 9, 2024
Accepted: September 29, 2024
Published: Oktober, 5, 2024

Abstract. Education policy plays an important role in shaping the education system in Indonesia. This research aims to analyze how education policy in Indonesia is influenced by power and how this impacts the quality of education. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The research design used is descriptive research, where data is obtained through analysis of documents relevant to the research topic. In this context, researchers use literature studies as the main tool to explore research topics, with support from books, articles in scientific journals, and other relevant scientific works. The research results show that education policy in Indonesia is often influenced by political interests, which can hinder effective policy implementation. This research emphasizes the importance of separating education policy from political interests to achieve a fair and quality education system.

Keywords:

Education policy, Power, Politics

Abstrak. Kebijakan pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kekuasaan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana data diperoleh melalui analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan studi pustaka sebagai alat utama untuk mendalami topik penelitian, dengan dukungan dari buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh

kepentingan politik, yang dapat menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pemisahan kebijakan pendidikan dari kepentingan politik untuk mencapai sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, namun di Indonesia, implementasi kebijakan pendidikan sering kali terganggu oleh dinamika kekuasaan dan politik. Meskipun tujuan kebijakan pendidikan seharusnya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan, dalam kenyataannya kebijakan ini sering dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri tetapi juga distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Sejak masa penjajahan, bangsa Indonesia telah menunjukkan minat yang besar dalam pengembangan pendidikan. Namun, pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh agenda politik pihak penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang diupayakan juga dibentuk sesuai dengan kepentingan mereka. Hubungan antara pendidikan dan politik bersifat dinamis. Keduanya saling terkait dan saling memengaruhi. Setiap aspek dalam pendidikan memiliki dimensi politik, begitu pula sebaliknya, di mana setiap aktivitas politik melibatkan elemen-elemen pendidikan. Namun, tidak semua pihak sepakat atau mendukung keterkaitan ini. Banyak yang merasa khawatir dengan situasi ini dan berharap untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan campur tangan politik dalam pendidikan. Mereka berharap agar pendidikan dapat terpisah dari politik, dengan keyakinan bahwa ini akan membebaskan lembaga pendidikan dari pengaturan politik yang mempengaruhi mereka.

Kebijakan pendidikan memainkan peran kunci dalam pembentukan struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pendidikan bukan hanya sarana untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga merupakan alat kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur

dan mengontrol masyarakat. Dalam konteks kekuasaan, kebijakan pendidikan bisa digunakan untuk mempertahankan status quo atau sebagai alat untuk perubahan sosial. Pemerintah sering memanfaatkan kebijakan pendidikan untuk memperkuat legitimasi mereka. Melalui kurikulum dan program pendidikan, pemerintah dapat menyebarkan ideologi resmi dan nilai-nilai yang mereka anggap penting, serta membentuk identitas nasional.

Kebijakan pendidikan juga dapat mencerminkan dan memperkuat ketimpangan sosial yang ada. Akses ke pendidikan berkualitas sering kali tidak merata, dengan anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah biasanya menerima pendidikan yang kurang memadai dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya. Hal ini dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

Pendidikan juga dapat berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial. Kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengatasi batasan-batasan sosial dan ekonomi. Pemerintah yang berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dapat menggunakan kebijakan ini untuk memberdayakan warganya dan mengurangi kesenjangan sosial.

Kebijakan pendidikan juga dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial. Dengan mengatur kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan sekolah, pemerintah dapat membentuk perilaku dan pemikiran generasi muda. Pendidikan dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan, disiplin, dan patriotisme, yang semuanya dapat mendukung stabilitas dan kontrol pemerintah. Kebijakan pendidikan memiliki peran yang kompleks dalam konteks kekuasaan. Ia dapat berfungsi sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan, memperkuat atau mengurangi ketimpangan sosial, memfasilitasi mobilitas sosial, serta sebagai instrumen kontrol sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan kekuasaan sangat penting dalam upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan politik, serta bagaimana pengaruh ini memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini diharapkan dapat membuka jalan untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan, sehingga sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang menuju yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana data diperoleh melalui analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada deskripsi rinci, penjelasan, dan interpretasi data yang tidak berbentuk angka. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengeksplorasi konsep, pengalaman, atau proses yang kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Pendekatan studi pustaka dalam penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk memahami dan menyusun pandangan yang komprehensif mengenai topik penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif dengan studi pustaka, desain ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan karakteristik, pola, dan hubungan antar variabel atau konsep yang ditemukan dalam literatur yang ditinjau.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan informasi dari berbagai literatur yang relevan untuk memahami suatu fenomena atau isu tertentu secara mendalam. Peneliti tidak melakukan eksperimen atau pengumpulan data lapangan, tetapi fokus pada

analisis kritis terhadap sumber-sumber yang sudah ada untuk menyusun gambaran yang komprehensif dan terperinci. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan studi pustaka sebagai alat utama untuk mendalami topik penelitian, dengan dukungan dari buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Dan Pemerintah

Hubungan antara politik dan pendidikan sangat erat, terutama di Indonesia. Politik mempengaruhi segala aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, pembiayaan, hingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah. Menurut buku 'Politik Pendidikan di Indonesia oleh, (Zulkifli, 2019) pendidikan sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti membentuk ideologi nasional dan memperkuat identitas bangsa. Kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh pemerintah sering kali mencerminkan kepentingan politik yang sedang berkuasa.

Politik pendidikan merujuk pada cara di mana keputusan pendidikan dibuat dan bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi sistem pendidikan. Ini mencakup proses legislasi, peraturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan. (Tilaar, 2019) Politik pendidikan sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan. Keputusan politik sering kali menentukan prioritas pendidikan, alokasi anggaran, serta perubahan kurikulum. Partai politik yang berkuasa, ideologi politik, dan tekanan dari kelompok kepentingan dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang diimplementasikan. (Kusumawati, E., & Widodo, 2019).

Kebijakan pendidikan adalah sekumpulan peraturan dan keputusan yang dibuat oleh badan pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan sistem pendidikan. Kebijakan ini mencakup aspek kurikulum, standar pendidikan, pembiayaan, dan aksesibilitas pendidikan. (Suyatno, 2019). Kebijakan pendidikan di Indonesia

tidak terlepas dari pengaruh politik. Setiap perubahan pemerintahan membawa perubahan kebijakan pendidikan, yang sering kali menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Kebijakan Pendidikan oleh (Suryani., 2019) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Jokowi-JK berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan revitalisasi pendidikan vokasi. Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik karena dianggap tidak merata dan kurang menyentuh aspek-aspek penting lainnya seperti pelatihan guru dan infrastruktur sekolah.

Pemerintah memegang peran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah menetapkan standar pendidikan nasional, mengawasi implementasi kurikulum, dan menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan. Menurut buku 'Manajemen Pendidikan Nasional' oleh (Sutrisno, 2019), pemerintah juga berperan dalam mengatasi berbagai masalah pendidikan seperti ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil dan kualitas pendidikan yang masih rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan tercermin dalam alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun tantangan masih banyak.

Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan utama dalam sistem pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendukung tujuan pendidikan nasional, menyediakan anggaran yang cukup, serta memfasilitasi akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. (Kusumawati, E., & Widodo, 2019)

2. Kebijakan Kebijakan dalam Pendidikan

Merdeka belajar adalah kebijakan pendidikan baru di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan. Kebijakan ini menyesuaikan proses

pembelajaran mengajar dengan kondisi lokal, budaya, sosio-ekonomi, dan infrastruktur yang ada.(Anjelina et al., 2021). Merdeka belajar adalah kebijakan yang bertujuan memberikan kebebasan dalam berpikir rasional. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidik memiliki kebebasan berpikir rasional agar dapat diimplementasikan dengan baik kepada peserta didik (Iwinsah, 2020).

Pada akhir 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, memperkenalkan konsep 'Merdeka Belajar.' Kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.(*Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.Merdeka Belajar, 2019*) Menurut Kompasiana tahun 2020, kemerdekaan belajar yang diterapkan dengan baik dapat menciptakan konsep "belajar yang merdeka" dan mengubah sekolah menjadi lingkungan yang merdeka. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Kebijakan merdeka belajar ini diinisiasi sebagai respons terhadap hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 yang menunjukkan hasil penilaian rendah bagi peserta didik Indonesia. Dari fakta tersebut, Nadiem Makarim menciptakan kebijakan merdeka belajar untuk mengatasi masalah tersebut.(syekhmuhammad, 2020)

Program ini diluncurkan untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan memberikan pendampingan intensif dan sumber daya tambahan. Tujuannya adalah menciptakan sekolah-sekolah yang menjadi motor penggerak perubahan dalam sistem pendidikan.(*Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.Panduan Program Sekolah Penggerak.*, 2021).

Kebijakan pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, pembiayaan, infrastruktur, dan aksesibilitas pendidikan. Di Indonesia, kebijakan pendidikan terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Periode tahun 2019 ke depan menunjukkan berbagai inisiatif baru dan perbaikan dalam sistem pendidikan

nasional. kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam pendidikan, kebijakan ini mencakup regulasi, program, dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.

3. Pengaruh Kekuasaan dalam Kebijakan Pendidikan, Dampak Kepentingan Politik

Politik memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perkembangan pendidikan di suatu negara, termasuk kebijakan terkait kurikulum, alokasi anggaran pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Di samping itu, politik juga dapat memengaruhi tingkat korupsi di sektor pendidikan, yang berpotensi mengurangi anggaran pendidikan serta mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.

Sistem pendidikan memiliki sifat terbuka yang membuat pengaruh sistem politik suatu negara sangat signifikan. Pendidikan dianggap strategis karena berperan dalam membentuk dan mengarahkan sikap politik demi keberlanjutan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa. Sistem politik menjadi salah satu input lingkungan yang dominan dalam pengaruh terhadap sistem pendidikan, di antara faktor-faktor lainnya. Pengaruh politik terhadap arah perkembangan suatu bangsa, termasuk penguasaan kekuasaan, dapat mempengaruhi konstruksi pendidikan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami dampak politik terhadap konstruksi pendidikan antara lain:

- a. Kebijakan Pendidikan: Kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah dapat mempengaruhi arah perkembangan pendidikan di negara tersebut. Kebijakan yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan.

- b. Anggaran Pendidikan: Anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah juga berdampak besar terhadap konstruksi pendidikan. Pengalokasian anggaran yang cukup dapat meningkatkan sistem pendidikan dan kualitasnya.
- c. Sumber Daya Pendidikan: Faktor seperti gaji guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidikan guru juga dapat dipengaruhi oleh politik arah perkembangan suatu bangsa. Sumber daya pendidikan yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.
- d. Kurikulum Pendidikan: Politik juga mempengaruhi pembentukan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan
- e. Korupsi: Keberadaan korupsi dalam sektor pendidikan dapat mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, serta berdampak negatif pada kualitas pendidikan.

Dalam membangun sistem pendidikan yang efektif, penting untuk adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di suatu Negara (Hengki et al., 2023). Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melanjutkan proyek Merdeka Belajar untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan nilai-nilai keadilan sosial untuk mengakses sekolah yang berkualitas (Khodijah, S., & Kusuma, 2023). Proyek ini mengakui bahwa semua mitra belajar, termasuk siswa, memiliki peran penting dalam memecahkan masalah dan mendapatkan dukungan penuh.

Untuk mendukung inisiatif ini, Rencana Pendanaan Pendidikan tahun 2021 mengalokasikan dana yang signifikan. Anggaran belanja pendidikan direncanakan meningkat lima kali lipat menjadi Rp 550 triliun, mencakup 20% dari Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024 senilai Rp 2.095,7 triliun. Dana ini akan dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan di tingkat pusat dan daerah sebesar Rp 49,2 triliun, serta untuk penelitian,

inovasi, dan pendidikan berkelanjutan sebesar Rp 39,5 triliun. Selain itu, ada alokasi untuk fasilitas ibadah sebesar Rp 46,8 triliun, layanan publik dan yayasan lainnya sebesar Rp 10,7 triliun, serta pengembangan kawasan dan cadangan kota sebesar Rp 267,9 triliun. Dana tambahan sebesar Rp 5 triliun juga disediakan untuk mendukung pedoman belanja yang terencana.

Secara total, anggaran absolut untuk sekolah dalam rencana belanja mencapai Rp 419,2 triliun, sejalan dengan prinsip konstitusi yang menetapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan seharusnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Khoiri, A., Zaini, & Munib, 2021). Pengaruh politik terhadap sumber daya manusia dalam pendidikan, seperti gaji dan sarana prasarana (SarPras), merupakan hal penting dalam konteks merancang pengalaman belajar yang bermakna, terutama dalam kehadiran guru yang profesional. (Hengki et al., 2023) Di Indonesia, dari total 2,7 juta guru, sekitar 65% dari mereka memiliki pendidikan kurang dari 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan guru yang profesional masih terabaikan. Profesionalisme guru, jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter atau pengacara, masih jauh tertinggal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki pelatihan minimal A1 dan pendidikan setingkat D4+. Namun, pelatihan guru sebelum masuk ke dunia mengajar seringkali belum memadai dalam praktik profesional. Mahasiswa pada fase ini belajar menerapkan pengetahuan inti akademik selama dua semester, dengan sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah untuk mengamati, membimbing, dan mengarahkan pembelajaran di bawah bimbingan guru yang profesional. Praktik sertifikasi guru dimulai sebagai upaya untuk mentransformasi guru menjadi profesional (Hoesny, M. U., & Darmayanti, 2021). Namun, ada indikasi bahwa praktik sertifikasi belum berhasil mengubah guru menjadi profesional yang sesungguhnya. Banyak guru yang mengikuti sertifikasi hanya untuk mendapatkan manfaat dari sertifikasi itu sendiri, tanpa motivasi intrinsik untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan,

mengevaluasi, dan mendiagnosis berbagai permasalahan siswa (Latiana, 2019).

Perbedaan antara guru bersertifikasi dan non-sertifikasi dalam hal kualitas profesionalisme mereka masih menjadi perhatian yang penting dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia. Dampak politik terhadap sistem pendidikan, termasuk struktur guru dan siswa serta pengaturan gaji, menekankan pentingnya mengembangkan akses ke sekolah sebagai landasan regulasi untuk meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan. Selama empat tahun terakhir, berbagai proyek telah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dengan strategi dasar untuk memperluas dan menyamakan partisipasi ini (Fitriyani, 2019). Pembangunan dan peningkatan organisasi pendidikan juga ditekankan, dengan fokus pada perubahan internal untuk meningkatkan kepemilikan, kepemimpinan, dan tanggung jawab bersama. (HM., 2018) Pendekatan ini mencakup pembiayaan untuk implementasi pembelajaran berbasis, peningkatan manajemen sekolah, serta kolaborasi regional penuh dalam organisasi, dengan tujuan memantau dan mengontrol pelaksanaan pendidikan yang lebih berkualitas, produktif, dan signifikan secara regional, serta bebas dari intrik dan nepotisme.

Penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembuatan dan implementasi kebijakan pendidikan. Kepentingan politik sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, perubahan kurikulum yang sering terjadi setiap pergantian pemerintahan merupakan bukti nyata dari pengaruh kekuasaan politik. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Kepentingan politik dapat menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Pergantian pejabat di kementerian pendidikan sering kali membawa perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Hal ini menyebabkan kebijakan yang sudah dirancang dengan baik menjadi sulit diimplementasikan. Selain itu, adanya intervensi politik dalam pengangkatan dan mutasi guru serta kepala sekolah juga mengurangi profesionalisme dalam pendidikan.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik sering kali tidak fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Program-program peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kurikulum sering kali terabaikan atau tidak berjalan dengan optimal karena adanya konflik kepentingan. Ini mengakibatkan mutu pendidikan tidak meningkat sesuai dengan harapan.

4. Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pendidikan di Daerah dan Solusi untuk Memisahkan Kebijakan Pendidikan dari Pengaruh Politik

Contoh Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia, beberapa kebijakan pendidikan yang mencerminkan hubungan antara politik dan pendidikan di Indonesia meliputi Kebijakan "Merdeka Belajar" Inisiatif ini mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran. Program ini diluncurkan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bagian dari upaya untuk merespon tantangan pendidikan di era digital dan globalisasi. (Rahmawati, A., & Mulyana, 2019)

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Dana BOS mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan distribusi anggaran pendidikan yang merata dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional sudah baik, implementasinya di daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan intervensi politik lokal. Kepala sekolah di beberapa daerah mengakui bahwa mereka sering kali harus mengikuti arahan dari pejabat daerah yang memiliki kepentingan politik, yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional.

Penelitian ini mengusulkan beberapa solusi untuk memisahkan kebijakan pendidikan dari pengaruh politik. Pertama, diperlukan adanya regulasi yang kuat untuk melindungi kebijakan pendidikan dari intervensi

politik. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan pendidikan. Ketiga, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu mengurangi pengaruh politik.

D. KESIMPULAN

Politik kekuasaan digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan kontrol mereka. Untuk mempertahankan dominasi mereka, pemerintah membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam mengelola urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang berpengetahuan. Namun, ironisnya, dalam beberapa situasi, pendidikan bisa dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk memperkuat posisi mereka dalam kekuasaan. Mereka melakukannya dengan menciptakan kebijakan atau sistem yang mendukung agenda kekuasaan mereka.

Oleh karena itu, pendidikan Islam dan kekuasaan saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain. Pemerintahan daerah, sebagai entitas yang mendukung pemerintah pusat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan di wilayahnya sendiri, termasuk pendidikan. Untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan disamakan di setiap daerah, pembagian kewenangan perlu dilakukan. Setiap daerah memiliki tanggung jawab dan haknya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

REFERENSI

- Anjelina, W., Silvia, N., & Gitituati, N. (2021). *Program Merdeka Belajar , Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan. 5*, 1977–1982.
- Fitriyani, F. (2019). Konsep Organisasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Sekolah. *EL-Ghiroh, 17*(2), 61–80.
- Hengki, Y., Tjalla, A., & Sarifah, I. (2023). *BANGSA (KEKUASAAN) TERHADAP KONSTRUKSI. 6*, 2467–2471.

- HM., M. A. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(1), 87–96.
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132.
- Iwinsah, R. (2020). Menakar Konsep Kemerdekaan Belajar. *Media Jualan Kito: Intens News Pelembang*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Merdeka Belajar*. (2019). <https://www.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Panduan Program Sekolah Penggerak*. (2021). <https://www.kemdikbud.go.id>.
- Khodijah, S., & Kusuma, I. H. (2023). Perbandingan Pendidikan Indonesia Dan India Tinjauan Kebijakan Terbaru. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 89–114.
- Khoiri, A., Zaini, & Munib, A. (2021). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Era New Normal. *Jurnal Sumenep*, 1(2), 1–2.
- Kusumawati, E., & Widodo, H. (2019). “The Influence of Political Dynamics on Educational Policy in Indonesia”. *Journal of Education and Practice*, 10(5), 33–40.
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 1(3), 1–16.
- Rahmawati, A., & Mulyana, D. (2019). “Merdeka Belajar: Political Policy Analysis in the Context of Indonesian Education Reform”. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 8(2), 57–68.
- Suryani. (2019). “Analisis Kebijakan Pendidikan di Era Jokowi-JK.” *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 101–120.
- Sutrisno. (2019). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Alfabeta.
- Suyatno, L. (2019). *Politik Pendidikan di Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- syekhmuhammad. (2020). merdeka-belajarata-belajarmerdeka. <https://www.kompasiana.com/>, 1.

Tilaar, H. A. R. (2019). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Kebijakan Pendidikan: Suatu Analisis Sosial-Budaya*. Rineka Cipta.

Zain, A. N. (2020). "Digitalisasi Pendidikan di Masa Pandemi: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2).

Zulkifli. (2019). *Politik Pendidikan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.